

Menurut model sistem, kebijakan politik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik. Kekuatan-kekuatan yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem politik dipandang sebagai masukan-masukan (*inputs*) sebagai sistem politik, sedangkan hasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan tadi dipandang sebagai keluaran (*outputs*) dari sistem politik.



Tuntutan-tuntutan timbul bila individu atau kelompok-kelompok dalam sistem politik memainkan peran dalam mempengaruhi kebijakan publik. Kelompok-kelompok ini secara aktif berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Sedangkan dukungan (*supports*) diberikan bila individu-individu atau kelompok-kelompok dengan cara menerima hasil-hasil pemilihan-pemilihan, mematuhi undang-undang, membayar pajak dan secara umum mematuhi keputusan-keputusan kebijakan. Suatu sistem menyerap bermacam-macam tuntutan yang kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lain.

Untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi hasil-hail kebijakan (kebijakan-kebijakan publik), suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. Oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan

mendasar. Keputusan-keputusan yang besar dan penting, seperti pernyataan perang dengan negara lain tidak tercakup dengan inkrementalisme. Sekalipun jumlah keputusan yang dapat diambil dengan menggunakan model rasional terbatas, tetapi keputusan-keputusan yang mendasar menurut Etzioni adalah sangat penting dan seringkali memberikan suasana bagi banyak keputusan yang bersifat inkremental.

Etzioni memperkenalkan *mixed scanning* sebagai suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses pembuat kebijakan pokok urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai.

Strategi penyelidikan campuran (*mixed scanning strategy*) menggunakan elemen-elemen dari dua pendekatan dengan menggunakan dua kamera, yakni sebuah kamera dengan sudut pandang lebar yang mencakup semua bagian luar angkasa, tetapi tidak sangat terperinci dan kamera yang kedua membidik dengan tepat daerah-daerah yang diambil oleh kamera pertama untuk mendapatkan penyelidikan yang mendalam. Menurut Etzioni, daerah-daerah tertentu mungkin luput dari penyelidikan campuran ini, namun pendekatan ini masih lebih baik dibandingkan dengan inkrementalisme yang

g. Model Rasional

Mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai perolehan sosial maksimum (*maximum social gain*) yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model rasional adalah „rasional“ dalam pengertian bahwa model tersebut memberikan preskripsi berbagai prosedur pengambilan keputusan yang akan menghasilkan pilihan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan kebijakan.

Teori-teori rasionalis berakar dalam aliran-aliran pemikiran positifisme dan rasionalisme jaman pencerahan yang berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang ilmiah untuk meningkatkan kondisi hidup manusia. Ide-ide ini didasarkan pada keyakinan bahwa berbagai permasalahan sosial seharusnya diselesaikan melalui cara yang „ilmiah“ dan „rasional“, melalui pengumpulan segala informasi yang relevan dan berbagai alternatif solusi, dan kemudian memilih alternatif yang dianggap terbaik. Model rasional menyimpulkan bahwa berbagai keputusan publik pada prakteknya tidak memaksimalkan manfaat di atas beban, tetapi hanya cenderung untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan untuk diri mereka sendiri dalam masalah yang sedang menjadi perhatian. „*Satisfying criterion*‘ ini adalah sesuatu yang nyata, sebagai sesuatu muncul dari hakekat rasionalitas manusia yang terbatas.

h. Model Inkrementalis

Model ini merupakan kritik terhadap model rasional. Model inkrementalis berpendapat bahwa para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak cukup waktu, intelektual, maupun biaya ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Model ini mencoba untuk menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktis dengan mendasarkan pada pluralitas dan demokrasi, maupun keterbatasan-keterbatasan kemampuan manusia. Landasan pokok rasional model ini adalah bahwa perubahan inkremental memberikan tingkat maksimal keamanan dalam proses perubahan kebijakan. Semua pengetahuan yang bisa dipercaya didasarkan pada acara satu-satunya untuk mengambil keputusan tanpa menimbulkan resiko dengan melanjutkan kebijakan sesuai dengan arah tujuan kebijakan lama membatasi pertimbangan-pertimbangan kebijakan alternatif dengan kebijakan-kebijakan yang secara relatif mempunyai tingkat perbedaan yang kecil dengan kebijakan sekarang yang berlaku.

i. Model Strategis

Disebut strategis adalah intinya pendekatan ini menggunakan rumusan runtutan perumusan strategis sebagai basis perumusan kebijakan. Perumusan makna strategis yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan

memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya) apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang.

Perencanaan strategis lebih memfokuskan pada identifikasi dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan luar dan di dalam organisasi, dan berorientasi pada tindakan. Proses perumusan strategis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis yang meliputi kegiatan.
2. Memahami manfaat proses perencanaan strategis, mengembangkan kesepakatan awal.
3. Merumuskan panduan proses.
4. Memperjelas mandat dan misi organisasi, yang meliputi kegiatan perumusan misi dan mandate organisasi.
5. Menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Proses ini melibatkan kegiatan perumusan hasil kebijakan yang diinginkan, manfaat-manfaat kebijakan, analisis SWOT (penilaian lingkungan eksternal dan internal), proses penilaian, panduan proses penilaian.

sebagai dasar perumusan. Model argumentatif atau deliberatif dikembangkan dari keyakinan kaum Shopia di Yunani Kuno yang menyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan perdebatan yang intens di antara para pihak. Di dalam model deliberatif dibutuhkan peran dari publik, tanpa publik proses kebijakan akan kering dan sangat berbau teknokratis

4. Pendekatan Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan *Top Down*

Menurut Meter dan Horn (Nugroho: 2008) implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Diantara variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah (1) aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (2) karakteristik agen pelaksana/ implementor; (3) kondisi ekonomi, sosial dan politik; (4) kecenderungan (*disposition*) pelaksana.

Sedangkan menurut Grindle dalam Wibawa (1994) mengatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan itu yang didalamnya meliputi : (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan;

- 5) Membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam pengetahuan dan seni, berkeahlian dan berketrampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab, serta mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁴²

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah An-Naafi⁴³ bahwa program akselerasi akademik (*Academic Acceleration*) sebuah program yang memberikan peluang bagi siswa yang cerdas/berprestasi untuk menempuh periode pembelajaran dalam masa yang singkat dari periode yang semestinya ditempuh oleh peserta didik pada umumnya. Maksudnya adalah periode pembelajaran untuk jenjang Ibtidaiyah/SD mungkin bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat 3 atau 4 tahun dari masa yang semestinya ditempuh selama 6 tahun. Sedangkan untuk periode pembelajaran jenjang Mutawassitha/MTs/SMP dan jenjang Tsanawiyah/MA/SMA mungkin bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat kurang dari 6 tahun dari masa yang semestinya ditempuh selama 6 tahun. Hal ini disebabkan karena dimungkinkan siswa yang cerdas/berprestasi tersebut telah menguasai materi pembelajaran secara umum untuk jenjang Mutawassitha/MTs/SMP dan jenjang Tsanawiyah/MA/SMA.

⁴² Depertemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Peserta Didik Cerdas Istimewa* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2009), 10.

⁴³ Abdullah An-Naafi, *Al-Muuhibah Wasaa`atus Shifr*, Majallatul Ma`rifah, 28 Jilid, Halaman 95-96. Nopember 1997. Omaan , Al-Urdun/Yordania.

Dan sangat dimungkinkan sekali siswa tersebut akan tuntas dan selesai masa pembelajaran pada usia yang lebih muda dan masuk perguruan tinggi pada usia remaja dengan demikian dia akan selesai untuk periode perguruan tinggi di usia yang relatif muda juga tidak sama dengan usia mahasiswa pada umumnya.

2. Penyelenggaraan Program Akselerasi

Penyelenggaraan program akselerasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Berbagai faktor banyak mempengaruhi dan sebagai sub-sistem dalam pendidikan. Ada delapan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menunjang tercapainya tujuan program akselerasi yaitu: (1) Masukan (*input*), (2) Kurikulum, (3) Tenaga Pendidik, (4) Sarana Prasarana, (5) Dana (biaya), (6) Manajemen, (7) Lingkungan (8) Proses belajar mengajar.

Pertama, *input* siswa melalui tahap seleksi yang ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

- a. Prestasi belajar dengan indikator: angka raport, Nilai Ebtanas Murni (NEM) dan atau hasil tes prestasi akademik berada 2 standar deviasi (SD) diatas *mean* populasi siswa.
- b. Skor psikotes yang meliputi: *intelegency quotient* (IQ) minimal 125, kreatifitas, tanggungjawab terhadap tugas (*task commitment*) dan *emotional quotient* (EQ) berada 2 SD di atas *mean* populasi siswa.
- c. Kesehatan atau kesempatan jasmani, jika diperlukan.

Dalam model akselerasi pada hakikatnya merupakan pembelajaran individual sehingga percepatan yang terjadi adalah akselerasi yang dicapai oleh individu siswa. Sekolah memiliki kebijakan untuk membatasi bidang studi yang diakselerasi misalnya terbatas hanya pada bidang studi yang diujikan secara nasional saja. Dalam model ini memberikan peluang untuk bidang studi IPA, Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Setiap siswa melakukan akselerasi secara individu sehingga dalam kelas inklusi ada variasi kecepatan belajar secara perorangan.

Jika dalam pelaksanaan akselerasi individual ini memang terjadi percepatan, maka guru harus segera melakukan dua kegiatan yaitu melakukan pengayaan dan pemberian *treatment* khusus. Dua pilihan tersebut dilakukan sebagai langkah lebih lanjut agar akselerasi individual melalui model ini lebih menguntungkan.

Layanan pendidikan bagi siswa CI sudah seharusnya berubah kepada paradigma yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan karakter siswa sehingga derajat kesulitan kurikulum maupun bobot pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keunggulan siswa.

Sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan bahwa layanan kelas akselerasi dilatar belakangi oleh tiga hal yaitu kebutuhan pendidikan yang khusus, keadilan sosial dan kebutuhan sosial ekonomi. Bagi mereka yang mempunyai alasan dari sudut pandang pendidikan memandang bahwa pemberian layanan pendidikan merupakan cara yang

kelas. Tetapi banyak faktor lain yang langsung maupun tidak mempengaruhi kondisi siswa.

Pengembangan kurikulum berdiferensiasi dilakukan dalam upaya memenuhi tuntutan dari karakter dan kebutuhan siswa CI+BI. Dengan demikian diferensiasi terkait dengan kecocokan tingkat keunggulan dan kerumitan kurikulum yang sesuai dengan kesiapan dan motivasi belajar yang dimiliki siswa. Diferensiasi bukan saja sebatas pada kurikulum tetapi juga dalam pengayaan dan perluasan kegiatan siswa akselerasi. Pengayaan tidak sebatas memberikan PR dan dilakukan dalam satu tipe. Pengayaan menunjuk pada perluasan dari kurikulum untuk mengembangkan pengetahuan, penerapan, ketrampilan berfikir dan sikap menuju ke tingkat yang lebih kompleks. Tujuan utama diferensiasi kurikulum adalah untuk merencanakan secara aktif dan secara konsisten membantu semua siswa agar belajar maksimal.

Berdasarkan pada diferensiasi di atas selanjutnya ditentukan materi kurikulum yang sesuai dengan siswa. Secara prinsip, penetapan materi yang secara efektif dapat dijadikan sebagai materi kurikulum bagi siswa akselerasi terkait dengan ketentuan sebagai sebagai berikut:

- a. Materi memang dikumpulkan dan memenuhi rasa keingintahuan siswa akselerasi dalam pengembangan keilmuan, memberikan peluang kepadanya dengan belajar hal-hal baru serta ketrampilan yang mereka butuhkan.

layanan yang sesuai bagi siswa CI diakibatkan dari rendahnya penguasaan guru dalam metodologi pembelajaran khusus CI.

Diharapkan dengan munculnya kesadaran untuk melakukan penyesuaian dan mempertimbangkan karakter siswa CI harapan munculnya pengembangan potensi siswa dan tidak terhambatnya kemajuan belajar siswa CI dapat segera menjadi realita. Kepemilikan wawasan guru tentang prinsip diferensiasi pembelajaran yang demikian diharapkan dalam diri guru terjadi pengamatan dan refleksi diri tentang apa yang diajarkan serta proses yang dijalani dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa.

Walaupun sebenarnya peran guru tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas prestasi siswa namun pemberian peluang yang kondusif bagi berkembangnya potensi kecerdasan siswa CI tetap menempatkan guru sebagai penanggung jawab utama. Dalam konteks ini guru dapat memberikan pula kesadaran tanggung jawab pada siswa atas pembelajarannya sendiri melalui penciptaan kemandirian belajar, berfikir kritis serta pemberian kesempatan untuk pengambilan keputusan.

Tuntutan hadirnya pembelajaran yang diferensiasi sesungguhnya merupakan konsekuensi dari munculnya kurikulum diferensiasi yang selama ini kita kenal, sehingga menjadi tidak banyak berfungsi ketika kurikulum yang sudah didiferensiasi tidak dituntaskan dengan pembelajaran diferensiasi pula. Diferensiasi sebenarnya bukan sekedar langkah perubahan drastis sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa,

namun juga harus terjadi keberlanjutan sehingga seluruh sistem pendidikan terjadi diferensiasi bukan hanya parsial misalnya hanya diferensiasi dalam seleksi siswa CI dan kurikulumnya saja, tetapi komponen lain juga harus menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk menunjang diferensiasi tersebut.

Untuk memfasilitasi pembelajaran bagi seluruh siswa CI memang dibutuhkan adanya penyesuaian dan modifikasi kurikulum maupun pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan siswa. Diferensiasi dalam seluruh komponen pembelajaran tidaklah berarti melakukan diskriminasi dan hanya mengajar kelompok tertentu dari siswa. Guru dianggap adil bila menyediakan sejumlah ragam variasi pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan diferensiasi kebutuhan pembelajaran siswa.

Materi ajar dikategorikan sebagai materi tingkat tinggi setidaknya memenuhi kriteria yaitu mampu mendorong siswa menjadi aktif, menuntut siswa harus menggunakan tipe berfikir tingkat tinggi demikian juga harus dilatar belakangi dengan pemahaman yang kaya dan mendalam dari siswa. Walaupun patokan penentuan materi ajar adalah relatif karena sangat tergantung format dan strukturnya pada siswa CI yang menjalani program itu, namun secara umum paling tidak ada empat karakteristik materi ajar yang diperuntukkan bagi siswa CI. Adapun karakter materi ajar yang dimaksudkan adalah:

